

COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM REVITALISASI KAMPUNG PINK MENJADI KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN TANAH TINGGI, KOTA TANGERANG

Oleh

Dewi Munika Sari¹⁾, Yudi Muhtadi²⁾, Irvan Arif Kurniawan³⁾ Muhammad Ridwan Caesar⁴⁾

¹⁾ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang)

²⁾ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang)

³⁾ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang)

⁴⁾ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari

E-mail : ¹⁾dewimonica82@gmail.com, ²⁾tubagusyudi@unis.ac.id, ³⁾iakurniawan@unis.com ⁴⁾caesar.fisip13@gmail.com

ABSTRAK.

Penelitian ini mengkaji mengenai collaborative governance pada program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung wisata yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan collaborative governance yang dilakukan dalam program revitalisasi Kampung Pink di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Berdasarkan tujuan dari penelitian, fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance pada program revitalisasi Kampung Pink serta menganalisis faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan collaborative governance program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung wisata di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa keterbatasan finansial, kurangnya komitmen, dan kurang kepercayaan menjadi penghambat pelaksanaan collaborative governance pada program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Revitalisasi, Kampung Pink, Kampung Wisata

ABSTRACT.

This research examines collaborative governance in the revitalization program of Kampung Pink into a tourist village located in Tanah Tinggi Village, Tangerang City. The purpose of this research is to understand how the application of collaborative governance is implemented in the revitalization program of Kampung Pink in Tanah Tinggi Village, Tangerang City. Based on the research objectives, the focus of this study is to analyze how collaborative governance is applied in the revitalization program of Kampung Pink and to analyze the inhibiting factors in the implementation of collaborative governance in the revitalization program of Kampung Pink into a tourist village in Tanah Tinggi Village, Tangerang City. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The collected data is then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results found that financial limitations, lack of commitment, and lack of trust were the main obstacles in the implementation of collaborative governance in the revitalization program of Kampung Pink into a tourist village.

Keywords: Collaborative Governance, Revitalization, Kampung Pink, Tourist Village

PENDAHULUAN

Kampung tematik merupakan salah satu inovasi pemerintah untuk pengembangan destinasi wisata (Kampung wisata) di Kota Tangerang. Kampung tematik merupakan sinergi yang telah dituangkan oleh pemerintah melalui RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023, dan Peraturan Walikota Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2019 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang berada di lingkungan kelurahan (Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2019).

Pembentukan Kampung Tematik tidak hanya mengubah tampilan suatu wilayah saja, tetapi juga mempengaruhi budaya masyarakat yang menerapkan gaya hidup bersih dan sehat sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kampung Tematik. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah segala macam bentuk kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas maupun layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah (Bappeda, 2020).

Berdasarkan data dari Bappeda, keberadaan Kampung Tematik di Kota Tangerang saat ini ada di 100 lokasi yang tersebar di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang, salah satunya adalah Kampung PINK. Kampung Pink merupakan kampung yang berada di Jl Al-Muhajirin RW 09, Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. Kampung ini dulunya dikenal sebagai kampung bandit karena banyaknya tindak kriminal dan juga peredaran narkoba, namun seiring berjalannya

waktu masyarakat di kampung ini mulai sadar dan ingin mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Masyarakat di kampung ini juga merasa tidak nyaman karena kampungnya kerap kali di cap sebagai "zona hitam". Kemudian pemuda karang taruna di kampung ini memiliki ide untuk mengubah kampung tempat tinggalnya menjadi kampung wisata, yang di beri nama sebagai kampung PINK (Paling Indah Nih Kampung). Sesuai dengan namanya, sebanyak 412 rumah warga dengan total luas 12,5 hektar di kampung ini di cat menggunakan warna pink. Selain itu, sepanjang dinding rel kereta api yang berada di kampung ini, di lukis mural oleh beberapa seniman. Karya seni tersebut bertemakan Kota Tangerang, Keagamaan, dan beberapa tema lainnya (Destiana, 2021).

Kampung Pink ini telah berjalan sejak diresmikan pada tanggal 27 Februari 2021 sampai saat ini. Namun permasalahan yang penulis temui pada saat observasi yaitu kurangnya atraksi wisata yang disediakan, cat dan lukisan mural pada dinding-dinding rel kereta api yang sudah mulai pudar. Kerja sama dalam proses revitalisasi yang dilakukan pada Kampung Pink ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Adapun stakeholder yang terlibat di dalam kampung Pink ini terdiri dari 4 sektor, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan media. Dari sektor pemerintah meliputi: Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang), dan Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. Adapun dari sektor swasta yaitu PT Cat Propan Raya, dari pihak masyarakat yaitu POKDARWIS (Kolompok Sadar Wisata), dan media yaitu TangerangTV.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai collaborative governance pada program revitalisasi kampung pink yang di analisis menggunakan teori Ansell and Gash (2008), Di dalam teori (Ansell & Gash, 2008) terdapat 4 indikator utama yaitu dimulai dari (1) kondisi awal (*starting condition*), (2) desain kelembagaan (*institutional design*), (3) kepemimpinan fasilitatif (*facilitative design*), dan (4) proses kolaborasi (*collaborative process*). Kemudian di dalam proses kolaborasi ini terdapat 5 tahap, yaitu dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen dalam proses kolaborasi (*commiment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcome*).

TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Governance secara umum dapat diartikan sebagai bentuk pergeseran dari “penyelenggaraan pelayanan publik” yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi juga melibatkan peran lain untuk ikut berpartisipasi atau berkontribusi baik dari masyarakat maupun dari pihak swasta (Astuti et al., 2020). Dalam ruang lingkup pariwisata, *governance* merupakan karakter dan pengaturan dari suatu proses, aturan, dan insting dalam pembuatan kebijakan sampai pada penerapannya untuk mencapai tujuan dan mampu menyelesaikan masalah bersama (Bevir, 2008 dalam Fathan Kusuma & Wahyudi, 2023).

Selain itu, Tata kelola (*Collaborative*) menurut Emerson, dkk (2012) dalam (Sudirman et al., 2022) dapat dijelaskan

sebagai sistem pengaturan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi orang secara aktif dari berbagai lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan ruang publik, baik dari sektor swasta maupun masyarakat sipil, dengan tujuan mencapai hasil publik yang tidak dapat tercapai secara individu.

Pada dasarnya, *governance* merujuk pada proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Kebijakan yang dibuat membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan partisipasi aktif dari semua pihak dalam mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya (Dewi, 2019).

Menurut Ansell and Gash (2008), *Collaborative governance* yaitu suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh organisasi non-pemerintah dan satu atau lebih lembaga pemerintah terkait dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan mengelola aset publik (Ansell & Gash, 2008). Selanjutnya menurut Ansell and Gash (2008), dalam dua dekade terakhir, telah muncul strategi baru dalam penyelenggaraan kebijakan, yaitu *collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang melibatkan langsung pihak-pihak lain di luar entitas pemerintah, dengan fokus pada pencapaian kesepakatan dan dialog dalam pengambilan keputusan bersama yang bertujuan untuk merancang atau melaksanakan kebijakan dan program-program publik (Kurniawan dkk., 2024).

Kampung Wisata

Kampung wisata merupakan suatu konsep pengembangan desa untuk dijadikan sebagai

destinasi wisata. Dalam konteks prinsip utama kampung wisata, yang dikenal dengan konsep "desa membangun", pendekatan ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengembangan usaha yang produktif, yang sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang ada (Putri, 2022)

Konsep pengembangan desa wisata melibatkan transformasi desa menjadi tujuan wisata yang menarik. Ini dilakukan dengan menggabungkan daya tarik alam dan budaya desa, fasilitas umum pariwisata, dan aksesibilitas yang memadai dengan cara hidup dan tradisi masyarakat desa. Prinsip inti dari pengembangan desa wisata adalah pemberdayaan masyarakat untuk membangun desanya sendiri. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan sektor pariwisata sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal (Rahma, 2024).

Prinsip ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal. Dalam upaya membangun desa wisata, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Kondisi Desa: Untuk mengidentifikasi potensi wisata, pihak desa perlu memiliki data yang jelas tentang kondisi desa serta ekosistem yang mendukung potensi lokasi wisata.
2. Kesiapan Masyarakat dan Struktur Organisasi: Pengelolaan desa wisata sebaiknya diserahkan kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, penyusunan struktur organisasi yang mengelola desa wisata serta kesiapan masyarakat dalam

mengelola desa menjadi hal yang penting agar desa wisata dapat berkembang dengan optimal.

3. Pengembangan Konsep Desa Wisata yang Unik: Desa wisata yang memiliki konsep unik akan mendapatkan perhatian yang berbeda dari daerah lainnya, meningkatkan daya tarik wisata (Putri, 2022).

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. W. Lawrence Neuman mengatakan bahwa penelitian kualitatif umumnya mengadopsi pendekatan interpretatif dan kritis terhadap isu-isu sosial. Peneliti kualitatif menitikberatkan pada pemahaman subjektif, proses pengartian, metafora, serta deskripsi mengenai kasus-kasus yang spesifik. Penelitian kualitatif berupaya mengakses berbagai dimensi dari realitas sosial, termasuk kesan yang membentuk suatu objek penelitian yang sulit diungkapkan melalui pengukuran yang tepat atau diekspresikan dalam bentuk angka (Somantri, 2005).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena atau realitas sosial dengan cara mendeskripsikan berbagai variabel yang terkait dengan masalah dan unit penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari buku, website, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu dengan tema dan teori yang sama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data. empat tahap dalam analisis data, yakni pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan membahas mengenai collaborative governance program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Di dalam proses kolaborasi, penting untuk melibatkan dialog tatap muka, membangun kepercayaan antara para aktor, mencapai komitmen dan pemahaman bersama, serta memperoleh hasil sementara. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan diuraikan di bawah ini:

Collaborative Governance Program Revitalisasi Kampung Pink Menjadi Kampung Wisata

Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada analisis temuan penelitian mengenai penerapan studi kasus Collaborative Governance Program Revitalisasi Kampung Pink Menjadi Kampung Wisata (Studi Kasus Pada Kampung Pink, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang) yang mengacu pada teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), terdapat 4 indikator utama yaitu dimulai dari Dialog tatap muka (Face to face dialog), Membangun kepercayaan (Trust building), Komitmen dalam proses kolaborasi (Commitment to process), Pemahaman bersama (Shared understanding), dan Hasil sementara (intermediate outcome).

1. Dialog Tatap Muka Langsung (*face to face dialogue*)

Dialog tatap muka merupakan sebuah tahap yang harus dilakukan dalam sebuah kolaborasi, dialog tatap muka disinilah yang akan menentukan terbentuknya kepercayaan dan

komitmen yang akan mendasari didalam kolaborasi yang akan dilakukan sehingga dapat tercapai kesepakatan dan tujuan bersama antar semua pihak yang terlibat sesuai dengan dialog tatap muka yang telah dilakukan.

Dialog tatap muka yang dilakukan dalam proses collaborative governance program revitalisasi Kampung Pink ini dimulai dengan tatap muka yang dilakukan oleh Ketua Kampung Pink dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk mengusulkan kerjasama pembuatan kampung wisata di Kampung Pink Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah melakukan tatap muka tersebut, maka menghasilkan sebuah kesepakatan antar pihak untuk melakukan kolaborasi dalam mengatasi permasalahan kumuh yang ada pada Kampung Pink tersebut.

2. Membangun Kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalin sebuah kolaborasi agar dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan tujuan yang telah ditentukan pada tahap dialog tatap muka berlangsung. Upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan oleh stakeholder dalam collaborative governance program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata ini yaitu dengan melakukan transparansi dalam setiap proses kolaborasi yang akan dilakukan, evaluasi dan monitoring rutin juga dilakukan sebagai bentuk upaya dalam membangun kepercayaan antar stakeholder dalam kolaborasi tersebut.

Kepercayaan yang rendah antar stakeholder bisa menjadi salah satu faktor penghambat dalam collaborative governance. Begitupun dengan collaborative governance pada

program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, kurangnya kepercayaan terhadap hasil yang akan dicapai dalam kolaborasi Kampung Pink menjadi salah satu penghambat proses revitalisasi yang dilakukan.

3. Komitmen Dalam Proses Kolaborasi (*commitment to process*)

Komitmen di dalam proses kolaborasi merupakan salah satu kunci keberhasilan yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kolaborasi yang akan dilakukan. Komitmen ini bukanlah suatu hal yang muncul dengan sendirinya, tetapi harus mampu diciptakan dan diterapkan langsung oleh semua stakeholder yang terlibat didalam sebuah kolaborasi. Seharusnya komitmen yang dilakukan bukan hanya pada saat awal melakukan sebuah kolaborasi saja, tetap komitmen itu harus tetap dijaga dan diterapkan sampai ini, juga untuk keberlanjutan Kampung Pink menjadi Kampung Wisata dimasa yang akan datang.

Dalam teori (Ansell & Gash, 2008), komitmen merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mendukung keberhasilan sebuah kolaborasi. Begitupun sebaliknya, kolaborasi tidak akan berjalan dengan optimal apabila komitmen yang dijalankan masih rendah dan minim. Selaras dengan hal tersebut, Komitmen merupakan salah satu faktor penghambat kurang maksimalnya hasil collaborative governance program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang.

4. Membangun Pemahaman Bersama (*shared understanding*)

Pada tahap ini, para pemangku kepentingan perlu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang bisa dicapai. Pemahaman ini mencakup adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang jelas, serta pemahaman mengenai nilai-nilai yang akan diperoleh dari kolaborasi (Astuti et al., 2020).

Bentuk upaya yang dilakukan dalam membangun pemahaman bersama dalam collaborative governance program revitalisasi Kampung Pink menjadi kampung wisata yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang yaitu dengan memberikan pemahaman kepada semua stakeholder dengan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu ingin menjadikan Kampung Pink ini menjadi Kampung Wisata. Semua stakeholder harus memahami tujuan yang sama, visi misi yang sama, dan konsep pembuatan Kampung Pink ini juga harus berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal.

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*)

Hasil sementara dari collaborative governance program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata pada saat ini memang belum mencapai 100%, tapi sudah mencapai 60%. Kampung Wisata Pink sudah berjalan sejak 27 Februari 2021. Memang sudah cukup bermanfaat bagi masyarakat lokal atau UMKM untuk berjualan, namun masih belum berjalan secara optimal. Karena terdapat beberapa atraksi wisata pada agenda rencana awal pembuatan Kampung Pink yang belum teralisasi, seperti pembuatan kolam renang, taman bermain anak dan sepeda-sepedahan mini. Keterbatasan sumber dana menjadi salah

satu penghambat kurang maksimalnya hasil yang telah capai saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai *collaborative governance* program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* program revitalisasi Kampung Pink menjadi Kampung Wisata menunjukkan terdapat kolaborasi yang terjalin antar beberapa stakeholder dari pemerintah, swasta, masyarakat dan media. Belum terdapat aktor akademisi yang ikut berkolaborasi dalam program *collaborative governance* program revitalisasi Kampung Pink tersebut. Jika dianalisis berdasarkan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), pelaksanaan *collaborative governance* dalam program revitalisasi tersebut sudah berjalan sesuai dengan teori Ansell and Gash (2008), namun dalam penerapannya masih belum optimal. Beberapa indikator yang masih belum optimal yaitu terdapat pada membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to process*), dan hasil sementara (*intermediate outcome*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative governance: dalam perspektif administrasi publik* (1st ed.). 2020.
- Bappeda. (2020). *Peraturan Walikota Kota Tangerang No 92*. <https://bappeda.tangerangkota.go.id/asse>

ts/uploads/informationpublic_20230313_1678676383.pdf

- Destiana, I. K. (2021, March 7). *Dulu Kampung Bandit, Sekarang Jadi Kampung Pink di Tanah Tinggi Tangerang*. Tangerang News. <https://www.tangerangnews.com/kota-tangerang/read/34486/Dulu-Kampung-Bandit-Sekarang-Jadi-Kampung-Pink-di-Tanah-Tinggi-Tangerang>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3. <https://journal.undiknas.ac.id>
- Fathan Kusuma, V., & Wahyudi, K. E. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata Kampung Pecinan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. *Cakrawala*, 6.
- Kurniawan, I. A., Machrunnisa, & Firna, N. A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 13–21.
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2019. (2019). BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/115145/perwali-kota-tangerang-no-11-tahun-2019>
- Putri, F. A. (2022). *Desa Wisata: Sebuah Wadah Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Masterplandes.com. <https://www.masterplandes.com/wisata/desa-wisata-sebuah-wadah-pengembangan-wilayah-dan-pemberdayaan-masyarakat/#:~:text=Desa%20wisata%20merupakan%20sebuah%20konsep,desa%20wisata%2C%20yaitu%20desa%20membangun.>
- Rahma, D. (2024). *Desa Wisata, Konsep Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/desa-wisata-konsep-pariwisata-berkelanjutan-berbasis-pemberdayaan-masyarakat/>
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi. *Indonesian Journal of*

International Relations, 6(1), 114–132.
<https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.335>